

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dewan Perwakilan Rakyat atau yang biasa disingkat DPR merupakan suatu lembaga politik sebagai simbol dari suara rakyat. Lembaga tinggi negara ini memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam era reformasi yang sudah berjalan selama kurang lebih dua belas tahun belakangan ini, Dewan Perwakilan Rakyat diharapkan mampu memainkan peran konsisten dalam mengawasi pemerintahan yang diselenggarakan oleh badan eksekutif yang dipimpin oleh Presiden sebagai kepala pemerintahan. Hal ini merupakan momentum yang tepat bagi DPR untuk mengembalikan citranya sebagai lembaga yang mewakili rakyat. Jika kita mencoba mengingat kembali pada masa orde baru sebelum era reformasi terjadi di negara kita, sudah menjadi rahasia umum bahwa Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat hanya sebagai simbol semu dari rakyat.

Simbol semu yang dimaksud adalah bahwa anggota DPR sebagai perwakilan suara dan aspirasi rakyat tidak memainkan peran sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan karena kekuasaan yang dimiliki oleh pemimpin negara pada masa itu sangat kuat dan tak tergoyahkan, terbukti dengan kekuasaan otoriter yang dimiliki oleh sang penguasa tersebut, ia mampu memerintah selama kurang lebih tiga puluh dua tahun. Hal ini merupakan sisi dilematis yang ada pada saat itu, disatu sisi kita sebagai bangsa Indonesia mendeklarasikan diri sebagai negara merdeka dan

demokrasi yang mempelopori Gerakan Non Blok bagi bangsa-bangsa Asia-Afrika untuk melawan imperialisme asing namun disisi lain pada praktik penyelenggaraan negara saat itu sangat bertolak belakang. Suatu hal yang sangat dilematis dan merupakan fakta sejarah yang menjadi pembelajaran bagi kita semua sebagai bangsa yang sedang berkembang dalam proses menuju kematangan dalam berdemokrasi.

Demokrasi merupakan sistem yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (J.J Rousseau dalam tulisan Ramlan Surbakti yang berjudul memahami ilmu politik, 1992). Berdasarkan pendefinisian tersebut diatas jelaslah bahwa dalam suatu negara yang menganut sistem demokrasi, rakyatlah yang berdaulat. Pemerintah dan negara sebagai penyelenggara negara merupakan simbol dari kedaulatan rakyat tersebut. Demokrasi memiliki sistem pembagian kekuasaan menjadi menjadi tiga yaitu Eksekutif sebagai penyelenggara kebijakan pemerintah atau pembuat kebijakan umum (*public policy*), Legislatif atau yang biasa disebut Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pengawas pemerintah sebagai penyelenggara negara, dan Judikatif sebagai penegak hukum yang mengawal kebijakan-kebijakan publik terkait kasus penegakkan hukum dan juga tak terlepas dari kedua lembaga tinggi negara tersebut.

Sebagai negara demokrasi yang masih dalam proses berkembang, DPR sebagai badan legislatif yang membuat undang-undang dimana anggota-anggotanya dianggap mewakili rakyat diharapkan dapat merumuskan kebijakan-kebijakan umum yang mencerminkan aspirasi dan dukungan rakyat. Untuk itulah badan legislatif dibentuk yakni sebagai badan yang membuat keputusan yang menyangkut kepentingan umum dalam bentuk undang-undang. DPR sebagai lembaga yang

mewakili kedaulatan rakyat memiliki fungsi-fungsi yang sangat penting bagi penyelenggaraan negara yaitu menentukan kebijaksanaan umum dan membuat undang-undang serta mengontrol badan eksekutif dalam arti menjaga supaya semua tindakan badan eksekutif sesuai dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah ditetapkan (Ramlan Surbakti, 1992). Fungsi ini memiliki peran yang penting dalam membawa kesejahteraan bagi rakyat melalui penetapan kebijakan yang ditetapkan. Dengan demikian diharapkan mampu membawa perubahan yang mendukung atau pro rakyat.

Badan legislatif dikatakan sebagai simbol rakyat karena para anggotanya dipilih melalui mekanisme pemilihan langsung oleh rakyat yang merupakan konstituennya. Namun pada pelaksanaannya untuk maju dalam pemilihan langsung sebagai anggota DPR, partai politiklah yang akan mengajukan calon-calonnya melalui pemilihan umum anggota dewan. Partai merupakan kendaraan politik yang harus dimiliki oleh masing-masing anggota dewan, tanpa partai mereka tidak mungkin melenggang ke Senayan sebagai anggota DPR RI. Sama halnya dengan DPR RI, partai merupakan lembaga politik yang mendukung sistem demokrasi dalam implementasinya. Secara umum partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka yang diklaim merupakan perwakilan dari suara rakyat (Ramlan Surbakti, 1992).

Dalam perkembangannya. Partai politik pertama-tama lahir di negara-negara Eropa Barat. Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang diperhitungkan dan diikutsertakan dalam proses politik, maka partai politik telah lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat dan pemerintah. Partai politik umumnya dianggap sebagai manifestasi dari sistem politik yang sudah modern atau dalam proses memodernisasikan diri. Dengan demikian, dewasa ini di negara-negara baru pun partai sudah menjadi lembaga politik yang biasa dijumpai. Di negara-negara yang menganut paham demokrasi, gagasan mengenai partisipasi rakyat mempunyai dasar ideologis bahwa rakyat turut berhak menentukan siapa-siapa saja yang akan menjadi pemimpinnya yang akan menentukan kebijaksanaan umum (M.Ostrogorsky, 1992). Pada permulaan perkembangannya di negara-negara Barat seperti Inggris dan Perancis, kegiatan politik pada mulanya dipusatkan pada kelompok-kelompok politik dalam parlemen.

Kegiatan ini mula-mula bersifat elitik dan aristokratis, mempertahankan kepentingan kaum bangsawan terhadap tuntutan-tuntutan raja. Dengan meluasnya hak pilih, kegiatan politik juga berkembang diluar parlemen dengan terbentuknya panitia-panitia pengatur pengumpulan suara para pendukungnya menjelang masa pemilihan umum. Oleh karena itu perlu dirasa memperoleh dukungan dari pelbagai golongan masyarakat, kelompok-kelompok politik dalam parlemen lambat laun berusaha mengembangkan organisasi massa sehingga terjalinlah suatu hubungan tetap antara kelompok-kelompok politik dalam parlemen dengan panitia-panitia pemilihan yang sepaham dan sekepentingan, dan lahirlah partai politik.

Di negara-negara bekas jajahan seperti Indonesia, partai-partai politik sering didirikan dalam rangka pergerakan nasional. Bahkan terkadang ada partai yang tidak duduk dalam dewan perwakilan rakyat. Setelah kemerdekaan dicapai dan dengan meluasnya urbanisasi, komunikasi massa, serta pendidikan umum, maka bertambah kuatlah kecenderungan untuk berpartisipasi dalam proses politik melalui partai politik. Partai politik memiliki fungsi sebagai sarana komunikasi publik yang menyalurkan suara rakyat, sarana sosialisai politik yang mengarahkan sikap dan orientasi masyarakat terhadap suatu fenomena politik, sarana rekrutmen politik yang mengajak masyarakat turut berpartisipasi dalam politik sebagai anggota partai, dan terakhir adalah sebagai sarana pengatur konflik yang memecahkan permasalahan yang timbul di masyarakat (Miriam Budiardjo, 2000)

Jika melihat pemilihan umum dewan perwakilan rakyat di Indonesia pada tahun 2009 yang lalu, terdapat 1.604.324 orang yang maju sebagai calon anggota legislatif dari masing-masing partai politik yang mengajukan mereka dan 11.215 orang diantaranya adalah calon legislatif DPR RI yang memperebutkan 560 kursi di DPR RI. (Metro TV Election Channel, 21 Maret 2009). Data ini mengungkapkan bahwa masyarakat masih menghargai partai politik sebagai salah satu lembaga politik yang mewakili rakyat di lembaga legislatif yakni Dewan Perwakilan Rakyat. Fakta ini juga menyiratkan bahwa partai politik masih memiliki daya tarik tersendiri dikalangan publik. Hal ini dapat dilihat dari motivasi masyarakat yang cukup kuat dalam berpartisipasi ke dunia politik melalui partai politik, terkait dengan data diatas.

Partai “X” sebagai salah satu partai yang lahir di era reformasi memiliki daya tarik tersendiri dalam 2 periode pemilihan belakangan ini baik dimata publik maupun pengamat politik. Dengan mengusung ideologi sebagai partai tengah, nasionalis dan agamis, partai “X” berhasil menempatkan posisinya sebagai partai besar di dalam kancah perpolitikan Indonesia. Selama 2 periode pemilihan legislatif mulai dari tahun 2004 sampai pada saat ini, partai “X” dapat mensejajarkan diri dengan partai-partai yang telah ada sebelumnya. Sebagai partai tengah modern, partai “X” berhasil meraih jumlah suara yang patut diperhitungkan di badan legislatif DPR RI dan memiliki *trend* yang positif pada dua pemilihan umum belakangan ini. Hal ini dapat dipertegas kembali pada hasil perolehan suara melalui pemilihan langsung legislatif DPR RI pada periode 2009-2014 dimana partai “X” mengirimkan jumlah kader yang tergolong berjumlah banyak. *Trend* tersebut menempatkan partai “X” pada grafik yang meningkat dalam hal perolehan suara di DPR RI.

Jika dibandingkan pada partai-partai lainnya yang lahir di era reformasi dalam hal perolehan suara, partai “X” memiliki kemajuan yang sangat pesat dalam 2 pemilihan umum legislatif belakangan ini. Dengan banyaknya kader partai “X” yang duduk di DPR RI periode 2009-2014, diharapkan anggota DPR RI fraksi “X” dapat memberikan perubahan sosial yang mampu membawa bangsa keluar dari berbagai macam persoalan pelik yang sedang dihadapi saat ini dan di masa yang akan datang. Melalui peran sebagai anggota dewan yang mengemban amanah rakyat, anggota DPR RI fraksi “X” juga diharapkan mampu membawa kedaulatan rakyat dalam menetapkan kebijakan-kebijakan publik sehingga melahirkan kesejahteraan bagi

masyarakat dalam implementasi yang diterapkan sebagaimana mestinya seperti sistem demokrasi yang telah dideklarasikan oleh pendahulu-pendahulu bangsa yaitu sistem yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Karena jabatan sebagai anggota dewan itu sendiri merupakan amanah rakyat.

Menurut penelitian David C. Mc Clelland (1970), untuk mendapatkan perubahan sosial yang mengarah kepada kemajuan bangsa dibutuhkan orang-orang yang didominasi oleh dorongan/motivasi untuk berprestasi yang tinggi. Hal ini terbukti dari hasil penelitian Mc Clelland yang memperlihatkan bahwa negara-negara maju adalah negara-negara dengan motif berprestasi yang tinggi. Motivasi adalah suatu proses yang membangkitkan, mengarahkan, dan menjaga atau memelihara perilaku manusia agar terarah pada tujuan (Greenberg & Baron, 1997). Motivasi juga merupakan faktor pendorong yang berasal dari dalam diri (Vincent Gaspersz, 1992). DPR sebagai lembaga legislatif sarat dengan kepentingan sosial yang ada di masyarakat dan juga tidak terlepas dari kepentingan politik. Hal ini disebabkan oleh fungsi DPR itu sendiri yang merupakan pembuat keputusan kebijakan publik. Tetapi kenyataannya, tindakan dan keputusan politik pada DPR tidak hanya ditentukan oleh fungsi (tugas dan kewenangan) yang melekat pada lembaga yang mengeluarkan keputusan (fungsi itu sendiri merupakan upaya mencapai tujuan masyarakat-negara atau nilai-nilai politik), tetapi juga dipengaruhi oleh motif sosial yang terdapat di dalam dirinya. (Ramlan Surbakti, 1992).

Menurut Mc Clelland, setiap individu memiliki motif sosial yang terdapat dalam dirinya. Hal ini merupakan cerminan dan dorongan yang terdapat dalam

individu. David C. Mc Clelland (1953), melakukan penelitian dan mengembangkan suatu teori mengenai motif-motif yang berhubungan dengan lingkungan sosial. Motif-motif tersebut adalah motif berprestasi (Motif berprestasi merupakan motif yang mengarah pada kecenderungan seseorang dalam bertingkah laku, untuk memenuhi kebutuhannya dalam berprestasi), kekuasaan (sebagai dorongan untuk mempengaruhi orang-orang dan mengubah situasi), afiliasi (hasrat yang mendorong individu untuk berinteraksi dengan orang lain yang mengandung kepercayaan, afeksi, dan empati yang simpatik). Berdasarkan survey awal yang dilakukan terhadap 10 orang anggota DPR RI Fraksi “X” periode 2009-2014 terkait dengan motif sosial yang dimiliki : terdapat 30% memiliki motif berprestasi, yang bertanggungjawab atas keputusan-keputusan yang telah ditetapkan dan memperkirakan setiap resiko yang telah dilakukan dalam keputusan politik serta berusaha untuk mendengarkan masukan dari masyarakat dari kebijakan yang telah diambil. 40% memiliki motif kekuasaan, berusaha memberi masukan terhadap kebijakan yang akan dikeluarkan sesuai dengan pandangan fraksi dimiliki, aktif dalam memberikan pandangan kepada anggota dewan lainnya terkait dengan posisi mereka sebagai wakil rakyat di lembaga legislatif pada rapat-rapat yang dilaksanakan, dan menjaga nama baik , status, serta kedudukan sebagai anggota dewan sehingga dapat menjaga citra pada masyarakat. Sebesar 30% memiliki motif afiliasi, mencari dukungan dan persetujuan orang lain (aktif melakukan komunikasi terhadap fraksi lain di DPR) dalam merumuskan kebijakan seperti dalam merancang undang-undang, mengharapkan suasana yang kooperatif dalam membahas kebijakan, dan menginginkan hasil yang saling menguntungkan

dengan berbagai fraksi terkait dengan pengeluaran kebijakan publik. Melihat fenomena di atas, peneliti tertarik untuk melihat bagaimana gambaran motif sosial pada anggota DPR RI Fraksi “X” periode 2009-2014.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana gambaran profil motif sosial pada anggota DPR RI Fraksi “X” periode 2009-2014.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Untuk memperoleh gambaran umum profil motif sosial pada anggota DPR RI Fraksi “X” periode 2009-2014.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Untuk memperoleh gambaran lebih lanjut mengenai profil motif sosial pada anggota DPR RI Fraksi “X” periode 2009-2014 meliputi motif berprestasi, kekuasaan, dan afiliasi berdasarkan usia, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoretis

- Memberikan informasi kepada Fraksi “X” DPR RI periode 2009-2014 mengenai profil motif sosial anggotanya dalam menjalankan perannya.
- Memperkaya penelitian dalam bidang kajian psikologi politik.

- Memberikan informasi mengenai penelitian profil motif sosial pada anggota DPR RI bagi peneliti lain yang berminat dalam melakukan penelitian lanjutan mengenai psikologi politik.

1.4.2 Kegunaan Praktis

- Memberikan informasi kepada Fraksi Partai “X” mengenai gambaran profil motif sosial (motivasi) para kadernya yang menduduki kursi DPR RI periode 2009-2014 agar mengetahui pemetaan motivasi kadernya dalam menjalankan kinerja.
- Memberikan informasi kepada Fraksi Partai “X” mengenai motif sosial (motivasi) kadernya yang berperan penting dalam pencapaian tujuan yang ingin diraih.
- Memberikan wawasan tambahan bagi pembaca yang ingin mengetahui gambaran profil motif sosial (motivasi) pada anggota dewan.

1.5 Kerangka Pemikiran

Anggota DPR RI fraksi “X” merupakan wakil partai “X” dalam DPR RI. Dalam menjalankan perannya sebagai anggota dewan, anggota DPR RI memiliki beberapa fungsi sebagai badan legislatif yang antara lain adalah menentukan anggaran yang akan dipakai oleh pemerintah terkait dengan kebijakannya sebagai penyelenggara pemerintahan, menentukan kebijaksanaan dan membuat undang-undang, dan mengontrol badan eksekutif dalam arti menjaga supaya semua tindakan badan eksekutif sesuai dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah ditetapkan.

(Miriam Budiardjo, 2000). Badan legislatif pusat yang terdiri dari anggota-anggota DPR RI merupakan wakil dari setiap suara rakyat yang memilih mereka dalam pemilihan umum langsung legislatif, sehingga jabatan yang mereka miliki saat ini adalah tak lain dari representasi amanah yang diberikan rakyat. Dengan demikian jabatan itu seharusnya mandat dari rakyat dalam keterwakilannya sebagai anggota dewan dalam melaksanakan setiap fungsi dan perannya seperti yang telah diatur dalam undang-undang negara.

Dalam implementasinya, anggota dewan yang terpilih juga tak lepas dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh partai “X” terkait dengan visi dan misi partai yang mengusung mereka sebagai anggota dewan di badan legislatif. Anggota DPR RI fraksi “X” yang telah terpilih pada periode masa 2009-2014 adalah wakil dari partai “X” yang biasa disebut sebagai fraksi “X” DI DPR RI sehingga biasanya suara yang diberikan dalam merumuskan berbagai kebijakan merupakan pandangan yang berasal dari fraksi/partai dimana mereka bernaung. Hal ini adalah hal yang biasa ditemui dalam negara-negara yang menganut sistem demokrasi dalam melaksanakan penyelenggaraan negara. Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga politik yang dianggap mewakili rakyat tidak lepas dari partai-partai politik yang menempatkan kader-kadernya pada kursi anggota dewan. Sesuai dengan sistem yang dianut dalam negara demokrasi, partai politik juga semestinya merupakan representasi dari rakyat. Partai politik adalah Partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat

atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan yang lain yang mempunyai pandangan berbeda (Sigmund Neumann, 1992).

Dalam negara demokrasi seperti Indonesia partai politik memiliki beberapa peranan penting : Pertama, sebagai sarana komunikasi politik yang menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran dalam masyarakat berkurang. Kedua, sebagai sarana sosialisasi politik. Di dalam ilmu politik sosialisasi politik diartikan sebagai proses melalui mana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat dimana ia berada . Ketiga, sebagai sarana rekrutmen politik. Mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai. Dengan demikian partai turut memperluas partisipasi politiknya. Keempat, sebagai sarana pengatur konflik (*conflict management*). Dalam suasana demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat dalam masyarakat merupakan soal yang wajar. Jika sampai terjadi konflik, disinilah fungsi partai politik berusaha untuk memecahkan dan mengatasi permasalahan yang timbul (Ramlan Surbakti, 1992).

Jika melihat dari dinamika di atas, terdapat beraneka ragam dinamika yang terjadi pada anggota DPR RI dalam melaksanakan peran dan fungsinya. Mulai dari peran dan fungsi anggota dewan yang diatur dalam undang-undang, peran sebagai perwakilan partai dalam menuangkan ideologi atau cara kerja di lembaga DPR, serta peran dalam menyuarakan aspirasi rakyat sebagai konstituen mereka dalam membuat dan menentukan kebijakan-kebijakan umum. Untuk itu anggota DPR RI diharapkan

mampu mengolah dan mengakomodir serta memposisikan diri dengan tepat dalam melaksanakan tugasnya. Dalam menjalankan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan motivasi sebagai energi yang memberikan kekuatan untuk memantapkan perannya, demi perubahan sosial masyarakat luas yang lebih baik. Untuk itulah mereka hadir sebagai pembawa harapan rakyat.

Motivasi adalah suatu proses yang membangkitkan, mengarahkan, dan menjaga atau memelihara perilaku manusia agar terarah pada tujuan (Greenberg & Baron, 1997). Menurut Mc Clelland (1953), motif terbentuk dari proses motivational yang kompleks yang melibatkan faktor-faktor internal dan eksternal dari diri individu. Faktor internal meliputi apa yang disebut sebagai disposisi motif dan faktor eksternal meliputi *demand* atau tuntutan lingkungan dan insentif. Melalui interaksi antara disposisi motif yang ada dalam diri seseorang dengan lingkungan, dan faktor-faktor insentif yang relevan, maka motif terbentuk dengan kekuatan tertentu.

Mc Clelland (1953), meyakini bahwa motif dan kebutuhan dipelajari sejak masa kanak-kanak dan juga diperoleh dari latar belakang budayanya. Mc Clelland (dalam Keith Davis, 1978) mengungkapkan bahwa motif-motif yang terdapat dalam diri seseorang merupakan hasil pendidikan dan pengalaman yang diperoleh individu dari lingkungan sosial dimana individu tersebut tinggal. Motif-motif tersebut dengan kekuatannya masing-masing dapat mencerminkan elemen-elemen budaya dimana seseorang dibesarkan misalnya, keluarga, sekolah, dan buku-buku yang pernah dibaca. David C. Mc Clelland (1953), melakukan penelitian dan mengembangkan

suatu teori mengenai motif-motif yang berhubungan dengan lingkungan sosial. Motif-motif tersebut adalah yaitu motif berprestasi (*achievement motive*), motif kekuasaan (*power motive*), dan motif afiliasi (*affiliation motive*). Motif berprestasi adalah kebutuhan seseorang dalam bertindak laku untuk berprestasi. Individu dengan motif berprestasi yang kuat sangat memperhatikan prestasi yang dicapainya dan memperoleh kepuasan dari usahanya dalam meraih prestasi tersebut.

Selain itu, orang yang memiliki motif berprestasi yang kuat tidak hanya berpikir mengenai tugas berprestasi namun ia juga memikirkan cara pencapaian tujuan dan rintangan apa saja yang akan ditemuinya serta bagaimana perasaannya jika ia berhasil atau gagal. Penelitian yang dilakukan oleh Mc Clelland menemukan beberapa karakteristik individu yang memiliki motif berprestasi yang tinggi : Mengambil tanggung jawab pribadi atas perbuatan-perbuatannya, mencari umpan balik (*feedback*) tentang perbuatan-perbuatannya, memilih resiko-resiko yang moderat di dalam perbuatannya (berbuat sesuatu yang ada tantangannya tetapi dapat dicapai secara nyata atau tujuan realistis), berusaha melakukan sesuatu dengan cara baru dan kreatif (berkaitan dengan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap), dan ingin lebih baik dari orang lain dan takut akan kegagalan dan kesalahan.

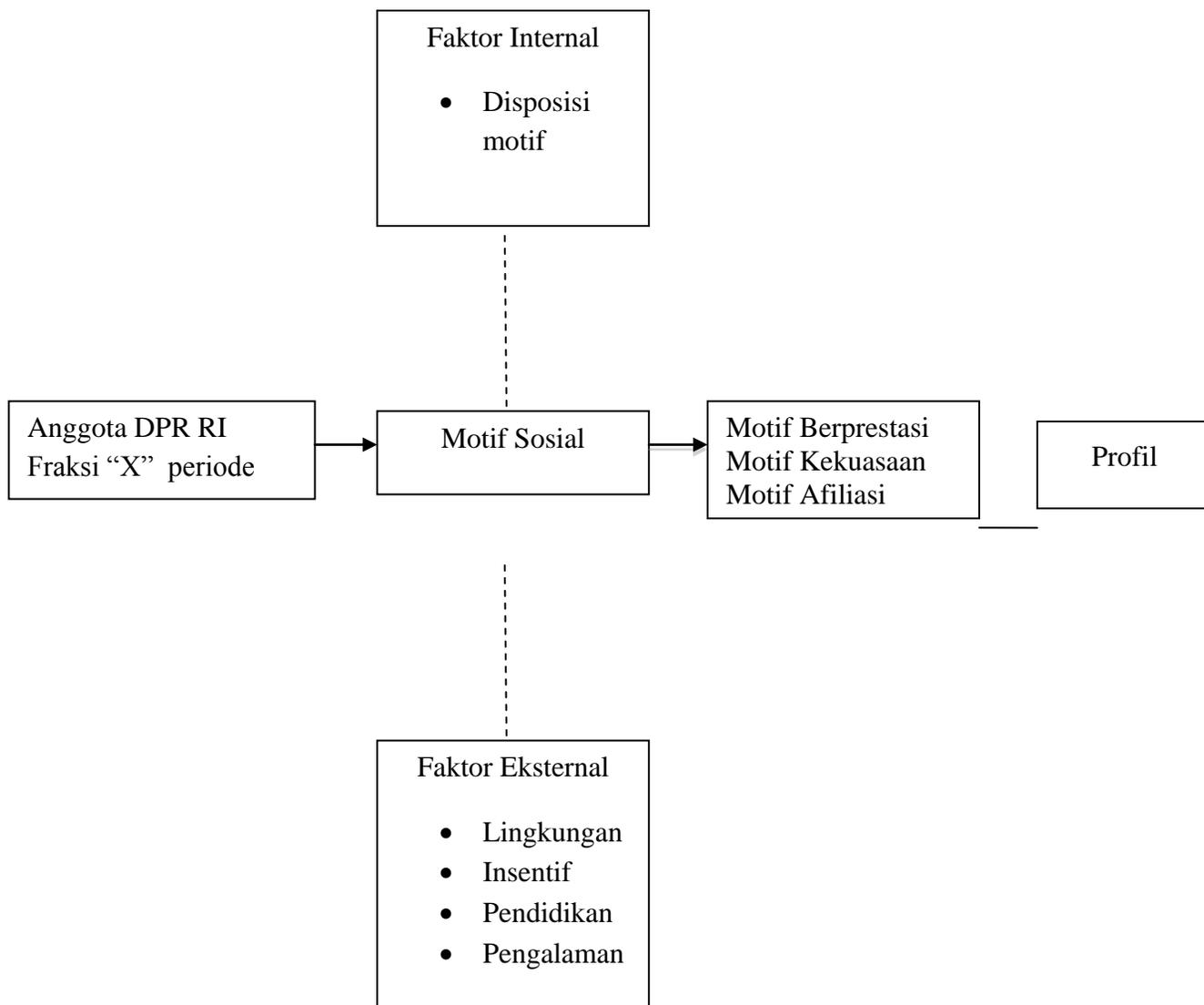
Motif kekuasaan adalah kebutuhan untuk mengendalikan lingkungan, mempengaruhi perilaku orang lain dan mengambil tanggung jawab atas mereka. Kebutuhan untuk membuat orang lain berperilaku sedemikian rupa sehingga mereka tidak akan berperilaku sebaliknya. Dapat dikatakan juga sebagai dorongan untuk mempengaruhi orang-orang dan mengubah situasi. Individu yang memiliki motif

kekuasaan yang tinggi, memiliki karakteristik: berkeinginan kuat untuk mengarahkan dan mengendalikan orang lain, sangat aktif dalam menentukan arah kegiatan dari organisasi dimana ia berada, berusaha kuat untuk mempengaruhi individu lain dan bertanggungjawab atas tindakannya, mengutamakan nama baik, kedudukan dan status serta menjaganya agar tidak tercemar, dan sangat peka terhadap struktur pengaruh antar pribadi dari kelompok atau organisasi.

Motif afiliasi adalah kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain yang mengandung kepercayaan, afeksi, dan empati yang simpatik. McClelland, mengidentifikasi karakteristik orang yang memiliki motif afiliasi tinggi : keinginan kuat untuk menjalin hubungan persahabatan dengan orang lain, menyukai situasi-situasi kooperatif daripada situasi-situasi kompetitif, menginginkan hubungan-hubungan yang melibatkan tingkat pengertian mutual yang tinggi, mencari persetujuan dan kesepakatan dari orang lain dan lebih memperhatikan segi hubungan pribadi yang ada dalam pekerjaannya daripada segi tugas yang ada pada pekerjaan tersebut.

Menurut Mc Clelland (1953), motif sosial memiliki peran penting dalam mencapai dan mempertahankan tujuan yang akan diraih. Motif ini bersinggungan erat dengan peran sosial yang ada dalam masyarakat maupun suatu lembaga. Anggota DPR RI Fraksi “X” periode 2009-2014 mengemban peran dan tugas sebagai penentu kebijakan umum dan sosial yang ada ditengah-tengah masyarakat luas. Dalam merumuskan, melaksanakan, dan mempertahankan rumusan kebijakan yang diputuskan terdapat motivasi (dalam istilah Mc Clelland motif sosial) yang

melatarbelakanginya. Gambaran motivasi tersebut dapat menjelaskan profil motif sosial pada masing-masing anggota DPR RI Fraksi “X” periode 2009-2014 dalam menjalankan fungsi dan perannya.



Bagan 1.1 Kerangka Pikir

1.6 Asumsi

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti mengasumsikan bahwa :

- DPR RI memiliki peran dan fungsi yang digerakkan melalui perilaku politik, dipengaruhi oleh faktor psikologi (psikis) yaitu aspek-aspek motif sosial mengingat jabatan yang diemban adalah jabatan publik.
- Perilaku politik yang ditampilkan oleh anggota DPR RI Fraksi "X" periode 2009-2014 dalam menjalankan fungsi dan perannya dilatarbelakangi oleh 3 motif sosial yang terdiri dari motif berprestasi, afiliasi, dan kekuasaan.
- Profil motif sosial memiliki pengaruh terhadap kinerja anggota DPR RI Fraksi "X" periode 2009-2014 dalam menjalankan perannya.
- Setiap anggota DPR RI Fraksi "X" periode 2009-2014 memiliki profil motif sosial yang berbeda-beda.
- Motif sosial pada anggota DPR RI Fraksi "X" terdiri dari motif berprestasi, afiliasi, dan kekuasaan dengan tingkat yang berbeda.